

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Krisis Rohingya di Myanmar membuktikan bahwa krisis tersebut memiliki akar historis yang cukup lama. Seiring berjalannya waktu dinamika sistem politik di Myanmar selepas pendudukan Inggris telah mengubah kedudukan etnis Rohingya yang mengidentifikasi Rohingya sebagai bukan warga negara Myanmar. Pelucutan hak-hak dasar etnis Rohingya telah memicu suatu bencana kemanusiaan yang menyebabkan arus pengungsi di kawasan diikuti dengan berbagai potensi dampaknya.

Terjadinya krisis Rohingya mencerminkan bahwa penegakan nilai-nilai HAM di Asia Tenggara masih membutuhkan perhatian lebih serius dalam mengejar ketertinggalan dari kawasan lain. Meski tidak dapat dipungkiri upaya penegakan nilai-nilai HAM di Asia Tenggara telah melalui perjalanan yang panjang. Sejumlah langkah demi langkah dilakukan oleh ASEAN beserta negara-negara anggotanya untuk mengadaptasi tren perubahan lingkungan strategis global akan pentingnya HAM sebagai komponen demokrasi.

Implementasi institusi HAM regional di Asia Tenggara memfokuskan pada perlindungan Krisis Rohingya yang tengah terjadi di Myanmar merupakan tragedi kemanusiaan AIHCR masih belum mampu menunjukkan peranannya sebagai sub-institusi regional dalam menangani kasus diskriminasi di Rohingya.

Peran yang dilakukan oleh AICHR untuk menyelesaikan kasus Rohingya dengan tetap mengedepankan *soft diplomacy* demi terselesaikannya masalah tersebut. Dalam Seperti sosialisasi prinsip-prinsip HAM dalam 3 pilar ASEAN, memetakan cara mengambil hati Myanmar AICHR juga mencari jalan keluar yang bisa diterima oleh Myanmar, AICHR juga melakukan pertanyaan terbuka pada Myanmar dan juga rutin mengadakan beberapa pertemuan, workshop maupun seminar agar mencapai solusi dari kasus tersebut. Selain itu, AICHR juga

bekerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN maupun dengan organisasi internasional lainnya.

Hambatan juga terdapat pada perjalanan AICHR sejak dibentuknya sampai pada saat ini dalam menangani kasus Rohingya. Adanya prinsip non intervensi yang harus tetap diperhatikan agar suatu negara tidak merasa dicampur tangani urusannya dan juga faktor-faktor lain yang menjadi hambatan yang harus dilalui AICHR demi terselesaikannya kasus Rohingya tersebut dan memaksimalkan kerja AICHR agar mendapat suatu tujuan yang ingin dicapai.

Sampai pada saat ini strategi tersebut telah dilakukan dan berhasil membantu dalam kasus tersebut. Walaupun sampai saat ini kasus Rohingya belum terselesaikan secara permanen dan masih mempunyai dampak yang besar seperti *refugees*, namun AICHR akan terus berusaha dengan bantuan-bantuan dan respon positif dari berbagai pihak yang mendukung dalam penyelesaian kasus tersebut salah satunya memberi masukan kepada pemerintah Myanmar dan dengan tetap menghargai kedaulatan negara Myanmar serta tidak menentang prinsip non-intervensi yang dipegang teguh oleh ASEAN.

6.2 Saran

Peranan AICHR dalam menangani isu krisis Rohingya di tataran regional menunjukkan bahwa peran kekuatan negara masih sangat dominan di Asia Tenggara. Melihat dari kesimpulan di atas menjadi suatu fakta yang tidak bisa dihindari lagi bahwa perlu adanya penyesuaian kembali dari prinsip ASEAN *Charter* yang memuat gagasan *non-interference*. Penyesuaian ini dinilai sangat perlu karena memandang universalitas nilai-nilai hak asasi manusia itu sendiri yang seharusnya menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat internasional dan regional ketika suatu negara tidak lagi dapat menjaga dan menjunjung martabat manusia sebagaimana dalam prinsip hak asasi manusia.